

Pentingnya *Good Partnership Empowerment* antara Dosen dan Mahasiswa;
Kajian hubungan kemitraan dosen dan mahasiswa di Jawa

Ali Mustadi, M.Pd
(Dosen PPSD FIP Universitas Negeri Yogyakarta)

Abstract

Working to learn and change (themselves and their world) in the context of partnership, empowering learners may act and reflect critically in dialogue with diverse, sometime competing, perspective. The partnership between lecturers and students in Java, actually, were influenced by some important aspects of the Javanese culture, they are *Javanese ethics, politeness, conflict avoidance, and respect*. The effects of Javanese culture on shaping the partnership between individuals (lecturers and students) will be looked at, where the Javanese culture is a primary influence on the formation of partnerships between individuals. One of the facts is the general tendency of the *hierarchical relationships* between lecturers and students.

A. Pendahuluan

Suatu diskursus pemberdayaan selalu akan dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktivitas pemberdayaan/*empowerment*. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan, karena tujuan pendidikan akan tercapai dikala terdapat hubungan kemitraan yang baik *good partnership* diantara civitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa. Tidak ada kesenjangan, batas-batas yang menghalangi dalam proses interksi dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa akan menjadi faktor berjalan tidaknya proses transformasi ilmu pengetahuan. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademis dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Indonesia, diskursus pemberdayaan semakin menguat berkaitan dengan pemberdayaan dalam dunia pendidikan, khususnya pemberdayaan hubungan baik antara dosen dan mahasiswa (*Good Partnership Empowerment*).

Keadaan dan perilaku tidak berdaya dalam terciptanya *good partnership* tersebut sering dipandang sebagai *deviant* atau menyimpang, padahal ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat beberapa faktor yaitu faktor struktural dimana dosen berada di atas mahasiswa dan faktor kultural dimana mahasiswa harus “tunduk” pada dosen, sehingga terbangunlah hubungan yang kaku dan tentunya tidak menguntungkan baik pada keduanya terutama tidak terbentuknya iklim akademik yang nyaman.

Para teoritis seperti Seeman (1985), Seligman (1972), dan Learner (1986) yang dirangkum Suharto meyakini bahwa ketidakberdayaan hubungan yang dialami oleh sebagian masyarakat akademisi (dosen dan mahasiswa) merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi diantara dosen dan mahasiswa tersebut.

Berangkat dari fenomena ketidakberdayaan hubungan tersebut, maka muncul berbagai tindakan pemberdayaan dengan berbagai pendekatan. Pengertian pemberdayaan hubungan/*relationship empowerment* sendiri menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai bidang, disiplin ilmu dan berbagai pendekatan. Menurut Rappaport dalam Suharto (1998:3); "*Relationship empowerment* menunjuk pada usaha realokasi kualitas hubungan melalui perubahan cara/perilaku hubungan personal dalam struktur sosial. *Relationship empowerment* adalah suatu cara yang diarahkan kepada pemberdayaan hubungan personal dalam masyarakat, atau komunitas agar mampu menciptakan suatu tatanan hubungan interaksi kehidupan social secara dua arah sebagai *partner* dalam kesetaraan/*equality*". Torre (1985:18) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah:

"A process through which people become strong enough to participate within, share in the control of, and influence events and institutions affecting their lives, (and that in part) empowerment necessitates that people gain particular skills, knowledge and sufficient power to influence their lives and the live those they care about".

Jadi tujuan pemberdayaan pada hakekatnya seperti yang dijelaskan Ife (1995:56): "*Empowerment aims to increase the power of disadvantage*".

Lebih jauh Torre (1985) dalam Parson (1994:106) menjelaskan tentang dimensi pemberdayaan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu:

1. *A development process that begins with individual growth, and possibly culminates in larger scope such as social change.*
2. *A psychological state marked by heightened feelings of self-esteem, efficacy and control.*
3. *Liberation resulting from a social movement, which begins with education and politization of powerless people and later involves collective attempts by the powerless to gain power and to change those structure that remain oppressive.*

Menurut beberapa pemerhati pendidikan, seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Weick, Rapp, Suliva & Kristhardt (1989) didapatkan kesamaan prinsipil dalam pemahaman tentang pemberdayaan yaitu:

- a. *Empowerment is a collaborative process, with the people and the practitioner working together as a partner.*
 - b. *The empowering process views society systems as competent and capable, given access to resources and opportunities.*
 - c. *Competence is acquired or refined through life experience, particularly experience affirming efficacy, rather than from circumstances where one is told what to do.*
 - d. *Society must perceive them selves as casual agent, able to effect changes.*
 - e. *Solution, evolving from the particular situation, are necessarily diverse and emphasize `complexities of multiple contributory factors in any problem situation (Solomon, 1976:27)*
 - f. *Informal social networks are a significant sources of support for mediating stress and increasing one`s competence and sense of control.*
 - g. *People must participate in their own empowerment; goals, means, and outcomes must be self defined.*
 - h. *Level of awareness is a key issue in empowerment; knowledge mobilizes action for change (Swift & Levin, 1987:81)*
 - i. *Empowerment involves access to resources and the capacity to use those resources in an effective way.*
 - j. *The empowerment process is dynamic, synergistic, ever changing, and evolutionary; problems always have multiple solution.*
- Empowerment is achieve through the parallel structure of personal and socioeconomic development". (Du Bois & Miley, 1992:212)*

Menurut Ife (1995:61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik namun mempunyai arti luas yang merupakan penguasaan masyarakat atas:

1. *Power over personal choices and life chances*. Kekuasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai pilihan hidup.
2. *Power over the definition of need*. Kekuasaan atas pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.
3. *Power over ideas*. Kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan mengekspersikan dan menyumbang gagasan dalam interaksi.
4. *Power over institutions*. Kekuasaan atas lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat, seperti; dosen dan mahasiswa, guru dan murid, dll.
5. *Power over resources*. Kekuasaan atas sumber daya, kemampuan memobilisasi sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
6. *Power over economic activity*. Kekuasaan atas aktivitas ekonomi.
7. *Power over reproduction*. Kekuasaan atas reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan, sosialisasi, nilai dan perilaku bahkan kelahiran dan perawatan anak.

Menurut Edi Suharto (1985:205) Pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

1. *Enabling*; adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat (dosen dan mahasiswa) berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
2. *Empowering* adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat (dosen dan mahasiswa) dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat (dosen dan mahasiswa) yang menunjang kemandirian dan equality.

3. *Protecting* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah.
4. *Supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya.
5. *Fostering* yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan.

B. Partnership Empowerment dalam Pendidikan

“Empowerment in education may be understood as the discovery and enactment of authoritative voice and purpose through one's unique experience”, pemberdayaan dalam dunia pendidikan dapat dipahami sebagai suatu penelusuran, penguatan diri dan tujuan melalui pengalaman hidup seseorang. Bekerja untuk belajar dan berubah (dalam diri dan dunia mereka) dalam konteks hubungan memberdayakan peserta didik dapat memunculkan berbagai perspektif. Dalam lingkungan belajar, keinginan individu untuk belajar merupakan bentuk sebuah penguatan/empowerment diri. Empowerment/pemberdayaan berkembang pada rasa ingin tahu, keberanian, kesabaran, komunikasi, dan peduli.

“*Good Partnership Empowerment* seeks to foster empowering relationships that cultivate and celebrate the knowledge, talents, skills, and passions of the lecturers and the students”, Program *Good Partnership Empowerment* berusaha untuk membina dan memelihara hubungan pemberdayaan atas pengetahuan, bakat, keterampilan, dosen dan mahasiswa.

B.1 Tujuan Good Partnership Empowerment

Tujuan dari Program *Good Partnership Empowerment* adalah:

1. Untuk membawa bersama-sama dosen dan mahasiswa dalam kemitraan timbal balik di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk mengajar dan belajar dalam situasi yang menyenangkan.

2. Untuk membangun masyarakat inklusif dan menciptakan kesempatan untuk belajar yang menghubungkan semua anggota komunitas untuk misi pendidikan dalam kemitraan.

Dirancang oleh Alice Lesnick dari Program Pendidikan, Amanda Root, McBride Scholar, bahwa *Good Partnership Empowerment* menumbuhkan hubungan akademik yang bersifat cross-contextual/cultural komunikasi dan struktur social untuk belajar seumur hidup melalui kemitraan antara dosen dan mahasiswa dalam mengajar dan belajar melalui hubungan timbal balik.

B.2 Good Partnership Empowerment dalam Pendidikan Nasional

Menneg PPN/Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta (2010) mengatakan bahwa Pemberdayaan Pendidikan Nasional Melalui *Good Partnership Empowerment* diantara civitas akademika dalam dunia pendidikan sangat penting dalam pendidikan nasional dan upaya membangun bangsa yang berkualitas, dan menjadi wahana strategis untuk membangun suasana pembelajaran, bermasyarakat, dan berbangsa yang sejalan dengan empat pilar utama pendidikan, yaitu: (1) belajar untuk belajar; (2) belajar untuk mengetahui; (3) belajar untuk menjadi; dan (4) belajar untuk hidup dengan orang lain.

Hal ini sangat relevan dan sejalan dengan komitmen bangsa untuk menjadikan pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran tetapi juga yang paling mendasar adalah untuk memperkokoh partnership yang pada akhirnya memperkokoh akhlak dan karakter bangsa. "Untuk itu, diperlukan solusi dalam menanamkan dan memekarkan segala sesuatu yang bernilai positif bagi perkembangan dan kepribadian bangsa. Aspek-aspek positif itu harus diagendakan dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang maju dan bermartabat," tambah Menneg PPN/Kepala Bappenas.

Sementara itu Ketua Presidium ICMI, Dr. Ir. Muslimin Nasution, APU, mengatakan bahwa untuk menghasilkan proses pendidikan yang baik, maka peningkatan kualitas hubungan akademik antara dosen dan mahasiswa, anatara guru dan siswa harus menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkuallitas.

B.3 Kemitraan Dosen dengan Mahasiswa

Dalam menganalisis kemitraan antara dosen dan mahasiswa di Jawa, kiranya perlu memahami struktur sosial dan institusi dimana kemitraan tersebut terbentuk. Pertama adalah memahami gambaran umum budaya Indonesia khususnya budaya Jawa yang mempengaruhi terbentuknya hubungan antar individu. Budaya Jawa yang dimaksud diantaranya adalah *Javanese ethics, budaya academic, dan hierarchy*. Kedua adalah memahami efek dari perbedaan struktur institusi seperti perbedaan metode belajar mengajar. Selain itu juga diperlukan analisis infrastruktur dan sumber daya yang terkait dengan terbentuknya kemitraan tersebut.

a. *The Javanese Ethics of Harmony*

Magnis-Suseno (1989: 61) mendeskripsikan bahwa ciri yang sangat menonjol dari orang Jawa adalah menjunjung tinggi keharmonisan (kerukunan/kedamaian) dengan lingkungan sosial, Dalam hal ini seseorang diharapkan dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan alam, dengan orang lain, dan dengan lingkungan spiritual. Bagi orang Jawa, segala sesuatu sudah diatur baik secara alami atau secara adat, etika/norma dan akan harmonis bila tiap-tiap elemen berada pada tempat yang semestinya.

Magnis-Suseno (1989) juga menyebutkan bahwa apabila keharmonisan ini dirusak maka akan terjadi peperangan, kekerasan, dan akan membawa pada kesialan. Oleh karena itu kepercayaan ini menjadi motivasi untuk mempertahankan keharmonisan alam, lingkungan social dan spiritual.

Magnis-Suseno (1989) menyebutkan ada empat prinsip orang Jawa untuk mempertahankan keharmonisan dalam hidup, empat prinsip tersebut adalah *Javanese ethics, politeness, conflict avoidance, dan respect*. Yang pertama adalah *Javanese ethics* dimana seseorang harus selalu mengikuti dan mentaati pola atau aturan tradisi; kebiasaan, norma adat dan agama serta bentuk-bentuk kesepakatan bersama yang menyatu dalam hubungan kehidupan kemasyarakatan, dimana tradisi tersebut telah menjadi landasan dalam hubungan seseorang dengan alam dan dunia spiritual, termasuk pola hubungan dalam dunia pendidikan. Tiga prinsip yang lain adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan simbol-simbol perilaku/*behavioural codes*, yaitu *politeness, conflict avoidance, dan respect* dimana orang Jawa sangat menjunjung tinggi terutama dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Symbol-simbol yang dimaksud adalah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Magnis-Suseno (1989) menjelaskan bahwa orang Jawa harus mengikuti segala bentuk pola aturan/norma tentang kesopanan terutama dalam menciptakan hubungan interaksi atau komunikasi yang harmonis, sehingga kesopanan/*politeness* meruakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan orang Jawa. Dua prinsip yang lain yaitu *conflict avoidance* dan *resect*. Dalam kehidupan orang Jawa kedua prinsip tersebut juga sangat dominan, dimana seseorang harus berupaya menghindari hal-hal yang memicu adanya gesekan atau konflik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip menghormati atau *respect*. Seseorang harus selalu berupaya menunjukkan sikap dan perilaku menghormati orang lain terutama terhadap orang yang lebih tua atau lebih dewasa, baik dari segi bahasa maupun gerak tubuh.

Jawa memiliki beragam etnik, termasuk institusi pendidikan dimana dosen dan mahasiswa berasal dari berbagai etnik, walauun demikian, budaya Jawa mendominasi dan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi sistem hubungan/*relationship* diantara etnik dan komunitas yang ada, terutama dalam dunia pendidikan khususnya di Jawa.

b. Kultur/budaya Akademik

Perguruan tinggi menjadi pusat perhatian dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam mempengaruhi dan merubah kondisi sosial masyarakat tertentu. Sehingga perguruan tinggi menjadi cerminan suatu kondisi kehidupan sosial masyarakat, termasuk sistem kelas social dan fungsi social perguruan tinggi tersebut. Dan uniknya, sekarang ini sistem pedidikan memiliki andil yang sangat penting dalam menciptakan kesenjangan sosial/*social inequalities*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dari kelas menengah keatas memiliki kesempatan yang lebih untuk bias masuk ke perguruan tinggi tertentu disbanding dengan masyarakat dari kelas menengah ke bawah, dan lebih lanjut, perbedaan kelas social anak tersebut juga mempengaruhi pilihan program studi yang diambilnya. Siswa/mahasiswa yang dari kelas sosial menengah kebawah tidak hanya membutuhkan waktu yang lebih untuk lulus tetapi juga mereka mengambil program studi yang menawarkan pekerjaan yang kurang prospek dimasa yang akan datang. Sebagai contoh hasil penelitian oleh Bourdieu (2004) di perguruan tinggi di Jogja dan di Perancis, dimana mahasiswa dari kelas sosial menengah kebawah di fakulats kedokteran dan

fakultas hukum jumlah sangat sedikit disbanding mahasiswa yang dari kelas social menengah keatas.

Sistem pendidikan sangat kompleks, terutama dalam kehidupan sosialnya. Perbedaan status ekonomi memicu status sosial, yang tentunya ini sangat berpengaruh pada kultur/*academic culture* termasuk pola hubungan interaksi dan komunikasi para civitas akademika, terutama antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan mahasiswa. Dimana beda perguruan tinggi, dengan beragam status ekonomi dan sosialnya, berbeda pula *relationship and partnership* antara dosen dan mahasiswa.

c. Hierarchy

Berdasarkan wawancara kecil dengan beberapa mahasiswa, diketahui bahwa sebagian besar dosen senior/*older lecturers* lebih cenderung *conservative, strict* dan *resisted* terhadap metode mengajar yang baru. Mahasiswa komplain karena dari tahun ke tahun *the older lecturers* hanya mengulang materi dan metode mengajar yang sama, mereka tidak akomodatif terhadap ide-ide, metode-metode yang baru, dan kurang mengakomodasi gagasan mahasiswa;

“Menurut saya *the older lecturers* mudah marah. Mereka seperti bla bla bla...dan ble ble ble...dan saya tidak tertarik, sehingga membuat saya tidak simpati. Setiap kali mengajar mereka selalu membaca, awalnya bukunya mungkin putih tapi lama-lama menjadi kuning ha ha...ya karena buku itu selalu dipakainya dari tahun ke tahun dan tidak mau menggunakan yang relative lebih baru, samapai-samai saya berfikir, kok bias mereka menjadi dosen.....” (IC, 07.09.10)

Terkadang mahasiswa juga merasa takut terhadap dosen senior/*the older lecturers*;

“Dia sangat strict, kami harus konsentrasi penuh, apabila kami ketahuan berbicara dengan teman, dia memanggil kami untuk maju kedepan kelas dan disuruh menjelaskan apa yang telah kami bicarakan dengan teman. Terkadang dia berbicara tentang sesuatu yang tidak kami suka...huhh...menebalkan. Dia juga marah apabila kami datang terlambat...” (IM, 16.09.10)

Dari wawancara kecil tersebut diketahui bahwa terdapat *hierarchy* antara dosen dengan mahasiswa, yang tentunya hal tersebut sangat kurang mendukung dalam terciptanya suasana/*academic culture* dan *partnership* yang bagus.

Sebagian besar *the younger lecturers* juga tidak simpatik dengan beberapa *the older lecturers' attitude* dan juga terhadap metode mengajarnya yang masih cenderung *conservative* dan kurang *up to dates*. Dan yang lebih memprihatinkan adalah ketika hal ini disampaikan kepada *the older lecturers*, hal ini dianggap tidak sopan, dan satu hal yang menarik adalah ternyata beberapa dari *the older lecturer* tidak mau dikritik, terutama tentang metode pengajaran dan juga tentang perilaku, dan selalu menjadi alasan *Javanese culture* bahwa mahasiswa harus selalu *respect and polite* terhadap *the older leturers*.

C. Kesimpulan

Satu hal yang menarik dalam kajian ini adalah beda institusi pendidikan beda pula kehidupan sosialnya, yang tentunya hal tersebut mempengaruhi pola interaksi dan komunikasi, terutama antara dosen dan mahasiswa. Mulai dari perbedaan status ekonomi atau kelas ekonomi sosial dosen dan mahasiswa, budaya lokal, *personality*, sampai budaya akademik, termasuk fakta bahwa “*the students did not criticize their lecturers or the younger lecturers did not criticise the older lecturers because it would have been impolite according to the Javanese culture*” memiliki peran yang sangat besar dalam membangun *relationship* dan *good partnership* terutama antara dosen dan mahasiswa (*lecturer-student partnership*).

D. Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre and Jean-Claude Passeron 1973: *Grundlagen einer Theorie der symbolischen Gewalt. Kulturelle Reproduktion und soziale Reproduktion*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre 1981: *Titel und Stelle. Über die Reproduktion sozialer Macht*. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt.
- Bourdieu, Pierre 2004: *Der Staatsadel*. Konstanz: UVK.
- Claramita, Mora; Santosa Budhiharjo and Effrayim Suryadi 2002: *The Effect of Problem-based Learning on Integrated Clinical Skills Competencies*. In: *Journal of Medical Education*, 6 (2): 208-211.
- Magnis-Suseno, Franz 1981: *Javanische Weisheit und Ethik*. Studien zu einer östlichen Moral. München: R. Oldenbourg Verlag.
- Magnis-Suseno, Franz 1989: *Neue Schwingen für Garuda. Indonesien zwischen Tradition und Moderne*. München: Peter Kindt Verlag.

Moust, Jos; Peter Bouhuijs and Henk Schmidt 1999: *Problemorientiertes Lernen*. Wiesbaden: Ullstein Medical.

Norman, Donald A. and James C. Spohrer 1996: *Learner-Centered Education*. In: Communications of the ACM, 39 (4): 24-27. Available at: <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=24&hid=122&sid=f55112dd-ac0e-4e5e-698-f47cb6f22c71%40sessionmgr106> [05.03.07].

Nugroho, Heru 2005: *The Political Economy of Higher Education: The University as an Arena for the Struggle for Power*. In: V. R. Hadiz, D. Dhakidae (eds.): *Social Science and Power in Indonesia*. Singapore: Equinox, pp. 143-165.

Savery, John R. 2006: *Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions*. In: *The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning*, 1 (1): 9-20. Available at: <http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=ijpbl> [04.03.07].

Internet Resources:

- <http://www.ethno.uni-freiburg.de> [28.02.07].
- http://www.pbli.org/pbl/generic_pbl.htm [05.03.07].